



KOMITMEN BERSAMA: Penandatanganan kerja sama Pemkot Jogja dan Yayasan Bethesda Yakkum di Ruang Bima, Balai Kota Jogja kemarin (25/1).

Three Zeros dalam Penanganan HIV&AIDS

JOGJA, Radar Jogja – Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mencanangkan Three Zeros dalam penanganan HIV&AIDS di Kota Pelajar. Meliputi eliminasi kasus baru HIV, eliminasi kematian akibat AIDS, dan eliminasi stigma pada orang dengan HIV/AIDS (ODHA).

Penjabat (Pj) Wali Kota Jogja Sumadi menilai, paparan HIV terbilang tinggi. Menurut data, paparan HIV di Indonesia ada sekitar 115.000. Sampai 2022, kisarannya 6.200 orang di DIJ. Sementara di Kota Jogja jumlahnya mencapai 1.488.

► Baca *Three...* Hal 7

Three Zeros dalam Penanganan HIV&AIDS

Sambungan dari hal 1

"Masih menunjukkan tinggi. Apalagi ini fenomena gunung es yang mungkin hanya terlihat di permukaan. Kami bertekad, persoalan penanganan HIV harus dituntaskan," ujarnya usai penandatanganan kerja sama dengan Yayasan Bethesda Yakkum di Ruang Bima, Balai Kota Jogja kemarin (25/1).

Sumadi menyebut, Three Zeros jadi program unggulan penanganan HIV&AIDS di Kota Jogja. Semua komponen masyarakat pun diharapkan mendukung program ini. "Ini butuh komitmen bersama menuntaskan persoalan HIV&AIDS," ujarnya.

Dalam program yang sudah berjalan, Pemkot Jogja menjalankan Three Zeros pada

empat kementren dan delapan kelurahan. Yakni Kementren Gedongtengen, Tegalrejo, Umbulharjo, dan Mantrijeron. Sementara kelurahan yang dilibatkan meliputi Sosromenduran, Pringgokusuman, Bener, Kricak, Giwangan, Warungboto, Suryodiningratan, dan Gedongkiwo.

"Kami berharap lurah dan puskesmas menyambut baik program ini," tegasnya.

Direktur UPKM/CD Bethesda YAKKUM Wahyu Priyo Saptono menambahkan, dunia tengah berupaya menghentikan epidemi AIDS. Termasuk Indonesia, menargetkan 95 - 95 - 95, yaitu pada tahun 2030, 95 persen orang terinfeksi HIV sudah terdiagnosis. Lalu 95 persen orang dengan diagnosis infeksi HIV mendapatkan terapi antiretroviral. Dan 95

persen orang dengan terapi antiretroviral sudah mengalami supresi virus (virus sangat rendah untuk mengurangi risiko penularan).

Dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan, kata Wahyu, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengobatan ODHIV sampai dengan 60 persen pada 2024. Selain itu, dengan adanya bukti bahwa pemberian ARV dapat mengendalikan HIV. "Hingga tidak terdeteksi dan dapat memperbaiki kualitas hidup ODHIV serta menurunkan risiko penularan," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemberian ARV dapat dilakukan di tingkat layanan kesehatan primer, seperti puskesmas oleh dokter sesuai dengan kewenangan dasar. Sejak tahun 2015, Kemenkes menyelenggarakan

Layanan Komprehensif HIV dan IMS Berkesinambungan (LKB) sampai di tingkat puskesmas. Melalui layanan LKB ini diharapkan akses layanan untuk konseling, pengambilan obat ARV, dan layanan perawatan dapat terjamin. Baik dari sisi geografis lebih dekat, finansial, dan sosial. Termasuk bagi kebutuhan populasi kunci. "Namun, belum semua layanan mampu menyelenggarakan LKB secara optimal sesuai dengan standar Kemenkes," sesalnya.

Wahyu berharap, upaya komprehensif yang dilakukannya berkontribusi dalam mengendalikan HIV & AIDS. Termasuk sinerginya bersama Pemkot Jogja. "Maka target Three Zero HIV di Kota Jogja harapannya dapat terwujud di 2030," tandasnya. (fat/din/fj/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005